

The Role of Village Government in Enhancing Digital Based MSME Governance in Balongdowo Village

[Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Tata Kelola UMKM Berbasis Digitalisasi di Desa Balongdowo]

Naufal alwan dhiya ulhaq¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: IlmiUsrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Balongdowo Village Government in improving the governance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on digitalization. This study uses the theory of the role of the government according to Maulida, Mustofa, and Haryati (2023) which divides the role of the government into three main indicators, namely regulators, facilitators, and catalysts. As a regulator, the village government plays a role in formulating local economic policies through RPJMDes, collecting data on MSMEs, and providing a framework for managing village websites as a means of digital promotion, even though it has not been formally supported by Village Regulations (Perdes). As a facilitator, the village government provides digital literacy training, opens promotional access through the village's official website (<https://balongdowo-sda.id/>), and provides support for e-commerce-based marketing facilities. Meanwhile, as a catalyst, the village government encourages the acceleration of digital transformation through collaboration with Surabaya Poltekkes students in developing websites and digital training for MSME actors. This study uses a qualitative descriptive method with interview, observation, and documentation techniques. The results of the study show that the role of the village government has been running but has not been optimal, especially in the aspect of continuous assistance and strengthening formal regulations. Institutional strengthening and monitoring systems are needed so that the digital transformation of MSMEs can take place consistently and sustainably.*

Keywords - Village Government, Digitalization, MSMEs, Role Theory, Balongdowo.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Balongdowo dalam meningkatkan tata kelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digitalisasi. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023) yang membagi peran pemerintah menjadi tiga indikator utama, yaitu regulator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah desa berperan dalam merumuskan kebijakan ekonomi lokal melalui RPJMDes, melakukan pendataan UMKM, serta menyediakan kerangka pengelolaan website desa sebagai sarana promosi digital, meskipun belum didukung Peraturan Desa (Perdes) secara formal. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan pelatihan literasi digital, membuka akses promosi melalui website resmi desa (<https://balongdowo-sda.id/>), serta menghadirkan dukungan sarana pemasaran berbasis e-commerce. Sementara sebagai katalisator, pemerintah desa mendorong percepatan transformasi digital melalui kolaborasi dengan mahasiswa Poltekkes Surabaya dalam pengembangan website dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa telah berjalan namun belum optimal, terutama dalam aspek pendampingan berkelanjutan dan penguatan regulasi formal. Diperlukan penguatan kelembagaan serta sistem monitoring agar transformasi digital UMKM dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.*

Kunci - Pemerintah Desa, Digitalisasi, UMKM, Teori Peran, Balongdowo.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam memperkuat pengelolaan UMKM, di mana keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kerja sama dari berbagai tingkat pemerintahan yang saling mendukung. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatur peraturan dan menetapkan kebijakan nasional, yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan inisiatif Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang mendukung digitalisasi usaha [1]. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah provinsi yang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator bagi pemerintah kabupaten/kota. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah provinsi mengarahkan serta menetapkan kebijakan strategis untuk mendukung digitalisasi UMKM. Sebagai fasilitator, provinsi berupaya memperkuat jejaring antarwilayah dan menyediakan wadah

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

promosi seperti pameran produk lokal. Sementara sebagai katalisator, pemerintah provinsi berfungsi mendorong percepatan integrasi program digitalisasi UMKM agar sejalan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah [2]. Selanjutnya, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, berfungsi sebagai kebijakan utama kebijakan di tingkat lokal, termasuk menyediakan sarana, pelatihan, dan bantuan langsung kepada pelaku UMKM. Penelitian di Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dalam memperkuat UMKM melalui program pelatihan dan kebijakan teknis [3]. Di sisi lain, pemerintah desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam implementasi karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki hak otonomi untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi lokal [4] salah satu contoh praktik di sejumlah desa menunjukkan hal ini, seperti pembentukan "Desa UMKM" yang bertujuan mendampingi produksi, pemasaran, dan akses pembiayaan [5] Peran pemerintah desa penting untuk mendukung UMKM pariwisata di Lebakmuncang melalui pelatihan dan bantuan promosi produk, untuk menumbuhkan kemandirian dan daya saing [6].

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, seorang kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola dan memajukan ekonomi desa serta menggabungkannya dengan tujuan mencapai produktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah pemberdayaan yang bisa diambil oleh pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi adalah dengan mendukung dan memperkuat peranan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) [7]. Pemerintah desa di Balongdowo, yang berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital bagi UMKM di kawasan pesisir. Produk olahan kupang merupakan salah satu komoditas unggulan, tetapi belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan dalam hal teknologi [8] Tugas ini termasuk dalam pengelolaan dan pengaturan kepentingan masyarakat setempat, yang meliputi pemberdayaan ekonomi melalui evaluasi dan pengaturan program [9]. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, seperti para nelayan dan pengolah kupang yang bergantung pada pendapatan sehari-hari mereka. Peranan pemerintah dalam pengembangan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memiliki pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung [10]. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merumuskan peraturan lokal serta kebijakan teknis yang mendukung penggunaan teknologi digital untuk UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah tidak hanya menyediakan sarana, tetapi juga terlibat dalam memberikan pelatihan literasi digital, dukungan promosi online, serta akses ke platform e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh [11] menekankan bahwa peran fasilitator dari pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan akses digital untuk UMKM setelah pandemi, sedangkan penelitian [12] menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan UMKM berbasis rumah tangga sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi digital. Penelitian yang dilakukan oleh [13] menunjukkan bahwa peran fasilitator dan mediator yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kemampuan UMKM, terutama dalam memperluas akses ke pasar baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pratama [14] yang menekankan perlunya evaluasi yang terus-menerus dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi UMKM. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan transformasi digital UMKM sangat bergantung pada konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan peran-peran strategis tersebut [15]

Konteks yang lebih luas menyoroti betapa pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Secara keseluruhan, UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia, tetapi tingkat digitalisasi masih tergolong rendah. Di Jawa Timur, hanya 13,5% dari UMKM yang telah beralih ke platform digital [16]. Situasi ini sejalan dengan data BPS Sidoarjo 2025 yang menunjukkan bahwa di Balongdowo, hanya 16,8% UMKM (21 dari 125 unit) yang telah mengadopsi digitalisasi. Sementara itu, 83,2% masih mengandalkan cara penjualan tradisional seperti pasar, warung, dan pelanggan tetap. Penempatan UMKM di desa ini sebagian besar dipenuhi oleh produk olahan kupang seperti petis, krispi, dan kerupuk. Namun, rendahnya pemahaman tentang digital, fluktuasi omzet yang dapat mencapai 30% saat musim hujan, serta kurangnya regenerasi karena anak-anak muda cenderung memilih untuk pindah ke kota membuat keadaan semakin sulit.

Tabel 1. Distribusi UMKM di Desa Balongdowo Berdasarkan RT dan Status Digitalisasi Tahun 2024

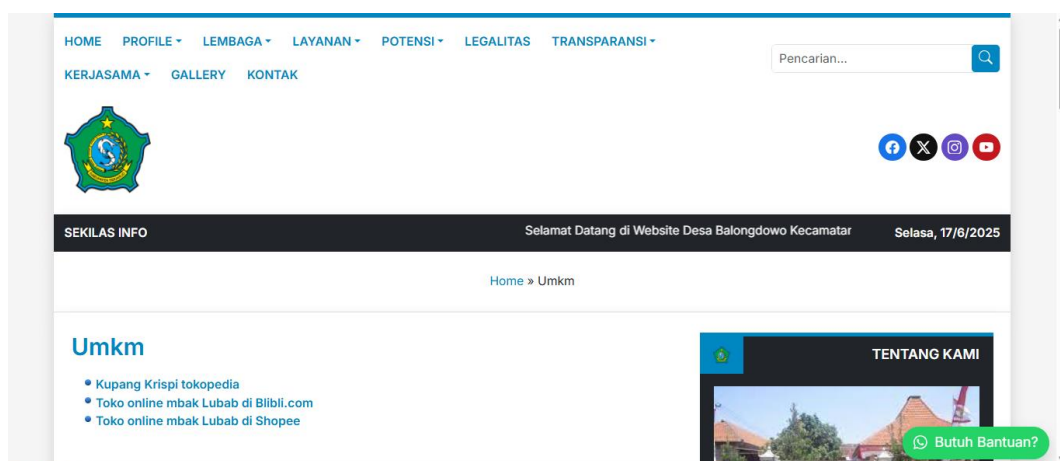
RT	Jumlah UMKM	Sudah Digitalisasi	Belum Digitalisasi	Kategori Usaha Dominan
RT 01	30	5	25	Kuliner (kupang, kerupuk)
RT 02	25	4	21	Kuliner, Pertanian Olah
RT 03	20	3	17	Kerajinan, Kuliner
RT 04	25	5	20	Kuliner, Jasa
RT 05	25	4	21	Pertanian Olah, Kerajinan
Total	125	21	104	

Sumber ; Observasi, 2025 (Diolah Peneliti)

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara potensi lokal, terutama produk olahan kupang yang menjadi komoditas utama, dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Observasi awal di Desa Balongdowo menunjukkan bahwa proses digitalisasi UMKM belum berjalan secara maksimal dan masih mengalami berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Ketiga, dalam perannya sebagai katalisator, interaksi antara pemerintah desa dengan pelaku UMKM dan pihak luar belum berlangsung secara intensif, sehingga kolaborasi yang diperlukan untuk memperluas akses pasar digital belum terwujud. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang ada di tingkat lokal dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan perannya, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait efektivitas peran pemerintah desa dalam mendukung digitalisasi UMKM.

Di ranah kebijakan, adanya dukungan terlihat melalui PP No. 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan akses terhadap teknologi [17] Pergub Jawa Timur No. 24 Tahun 2022 yang berfokus pada pencapaian literasi digital sebesar 60%, Namun, tantangan seperti ketidakstabilan koneksi internet, pelatihan yang tidak memadai untuk generasi muda, dan metode pengawasan manual terhadap kualitas produk tetap menjadi masalah. Selain informasi angka yang menunjukkan minimnya tingkat adopsi digital oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, tidak kalah penting untuk mengamati tindakan konkret yang telah diambil oleh pemerintah desa dalam membantu promosi produk lokal melalui platform digital.

Website UMKM Desa Balongdowo merupakan hasil pengembangan Mahasiswa Poltekkes yang melaksanakan Pengabdian Masyarakat di desa tersebut yang berlangsung selama 2 bulan. Pengembangan website dilakukan sebagai bagian dari program Pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kapasitas digital masyarakat desa, termasuk pelaku UMKM. Mahasiswa Pengabdian masyarakat bertanggung jawab dalam proses perancangan tampilan, pengumpulan data UMKM, serta pengunggahan konten awal pada website. Sementara itu, setelah program ini berakhir, pengelolaan website diserahkan kepada aparatur desa untuk pembaruan informasi dan pemeliharaan berkelanjutan. Kehadiran website ini menjadi salah satu sarana digital yang membantu memperluas jangkauan pemasaran produk lokal serta mendukung proses digitalisasi UMKM di Desa Balongdowo.



Gambar 1. Halaman UMKM pada website resmi Desa Balongdowo

Sumber; balongdowo-sda.id (2025)

Gambar 1 memperlihatkan halaman UMKM di situs resmi Desa Balongdowo yang mempromosikan produk-produk lokal, contohnya Kupang Krispi dan Toko Online yang dijual melalui *platform e-commerce*

(Tokopedia, Blibli, dan Shopee). Penampilan ini mencerminkan fungsi pemerintah desa sebagai penghubung dalam upaya digitalisasi UMKM, yaitu dengan memberikan ruang promosi online untuk mendukung pelaku usaha lokal dalam memperluas pasar mereka melalui media digital. Sejumlah kajian sebelumnya telah mengungkapkan kontribusi pemerintah desa dalam penguatan UMKM. Dalam [18] menemukan bahwa pemerintah Desa Gendoh berfungsi sebagai penghubung untuk penerapan tata kelola yang baik dalam penyediaan layanan publik melalui program “Smart Kampung”, yang mencakup pelatihan digital dan akses terhadap informasi pasar. Namun, kajian tersebut lebih terfokus pada layanan publik secara umum dan belum menggarisbawahi pentingnya evaluasi keberhasilan program, berbeda dengan perhatian yang diberikan di Balongdowo. [19] menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Labuan Bajo memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital dan pelatihan literasi, melalui program-program seperti “MABAR Smart” dan “Gali Ilmu Literasi Digital”. Penelitian ini menekankan fungsi penting pemerintah daerah sebagai pengatur, tetapi lebih difokuskan pada konteks pariwisata, yang berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengarah pada desa pesisir dengan potensi kupang. Selanjutnya, [20] meneliti Desa Kujang di Kabupaten Ciamis dan menemukan bahwa peran pemerintah desa sebagai penggerak digitalisasi sangat bergantung pada dukungan dari luar, yaitu dari pemerintah kabupaten. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya keterlibatan pelaku usaha menjadi penghadang dalam maksimalisasi, yang sangat bertentangan dengan kondisi di Balongdowo di mana pemerintah desa juga menjalankan peran sebagai pengatur dan evaluator internal. Pemerintah Desa Balongdowo telah berkolaborasi dengan mahasiswa poltekkes menyediakan platform promosi digital sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, permasalahan yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM, yang tercermin dari belum optimalnya penggunaan website dan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dengan efektivitas implementasi di tingkat pelaku usaha. Secara teoretis, peran pemerintah dalam penguatan UMKM dapat dianalisis menggunakan teori peran pemerintah menurut Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023) yang membagi peran pemerintah ke dalam tiga indikator, yaitu regulator, fasilitator, dan katalisator. Dalam perspektif tersebut, keberhasilan digitalisasi UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi regulasi, keberlanjutan fasilitasi, serta kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi dan mendorong inovasi. Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis dengan memfokuskan analisis pada peran pemerintah desa dalam konteks wilayah pesisir berbasis potensi lokal olahan kupang, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai efektivitas peran pemerintah desa dalam mengintegrasikan fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mendorong transformasi digital UMKM.

Teori yang digunakan dalam jurnal *The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME*, peran pemerintah daerah dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dijelaskan melalui tiga indikator utama, yakni; regulator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan, aturan, serta perangkat hukum yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, indikator peran regulator diukur dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan memberi ruang partisipasi bagi pelaku UMKM, kejelasan tata kelola perizinan usaha, serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor UMKM di tingkat lokal. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut mampu menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat untuk mempercepat inovasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Indikator katalisator diukur dari sejauh mana pemerintah mampu mendorong inovasi kebijakan, memotivasi pelaku UMKM untuk berinovasi, serta membangun sinergi antaraktor dalam mendukung keberlanjutan usaha. Berdasarkan studi terdahulu yang telah mengkaji fungsi dari pemerintah desa dan daerah dalam proses digitalisasi serta penguatan UMKM. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh [21] menekankan sumbangsih Pemerintah Desa Sugihwaras dalam menciptakan desa cerdas dengan menyediakan aplikasi pelayanan dan situs web desa. Tindakan yang teridentifikasi adalah sebagai penghubung, pendorong, dan penggerak. Namun, penelitian ini tidak secara mendetail membahas peranan desa dalam penguatan UMKM. [22] melakukan penelitian tentang peranan Pemerintah Desa Kedungrejo dalam memberikan dukungan kepada UMKM kerupuk di Kecamatan Jabon. Penelitian ini mengungkap bahwa peran desa umumnya terbatas pada penyediaan fasilitas administratif dan tempat pelatihan. Sebagai pengatur, desa menunjukkan sikap pasif, sementara sebagai penggerak, kontribusinya tergolong lemah karena kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelaku UMKM. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh [23] meneliti peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai penghubung, pengatur, dan penggerak melalui pemberian bantuan, pelatihan, dan regulasi yang mendukung. Meskipun demikian, fokus dari penelitian ini terletak pada tingkat pemerintah daerah, bukan pada pemerintah desa. Dari studi sebelumnya, terlihat bahwa penelitian lebih fokus pada dukungan umum dari pemerintah seperti pelatihan, akses pasar, dan pengembangan desa yang berbasis digital. Namun, belum ada penelitian yang khusus membahas bagaimana pemerintahan desa melaksanakan tugasnya dalam mendigitalisasi UMKM yang didasarkan pada potensi lokal.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui tiga fungsi strategis, yakni sebagai

regulator, fasilitator, dan katalisator. Sementara itu, dalam peran sebagai katalisator, penelitian ini mengamati bagaimana pemerintah mampu mendorong kolaborasi lintas sektor, memotivasi inovasi, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Selain merumuskan tujuan penelitian, kajian ini juga diarahkan untuk menguraikan secara analitis bagaimana Pemerintah Desa Balongdowo menggunakan tiga peran fungsionalnya, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator, dalam konteks penguatan digitalisasi UMKM berbasis potensi lokal. Fokus analisis tidak hanya tertuju pada keberadaan regulasi atau kebijakan yang disusun, tetapi juga pada mekanisme operasional, pola interaksi, serta strategi intervensi yang dijalankan pemerintah desa dalam mendorong adaptasi teknologi bagi pelaku UMKM.

Pemeriksaan peran fasilitator meliputi bentuk dukungan yang diberikan baik berupa penyediaan sarana, layanan pendampingan, maupun media promosi digital sedangkan peran katalisator dianalisis melalui kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan kolaborasi lintas aktor, mendorong inovasi, dan mempercepat dinamika transformasi ekonomi lokal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan peran pemerintahan desa dalam ekosistem digital UMKM dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berbasis teknologi di tingkat lokal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam digitalisasi UMKM dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023) yang meliputi tiga indikator yaitu regulator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian dilaksanakan di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen desa, laporan BPS, peraturan terkait UMKM, dan literatur ilmiah. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola UMKM berbasis digital sesuai tiga indikator tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria pihak yang terlibat langsung dalam program digitalisasi UMKM, yaitu perangkat desa, kepala desa dan pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan digital. Informan penelitian terdiri dari tiga informan utama yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan dalam jurnal *The Role of Local Government in Reog Ponorogo MSME*, yang menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup tiga indikator utama;

- a. *Regulator.*
- b. *Fasilitator.*
- c. *Katalisator.*

Dalam konteks penelitian ini, ketiga indikator tersebut menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana pemerintah Desa Balongdowo menjalankan perannya dalam mendukung digitalisasi UMKM, melalui penguatan kebijakan, pemberian fasilitas, serta pembangunan kolaborasi yang berkelanjutan dan inklusif.

A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator dalam kapasitasnya sebagai pengatur merupakan elemen penting dalam pengelolaan pemerintahan tingkat desa yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Maulida, Mustofa, dan Haryati (2023), regulator dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah untuk merumuskan kebijakan, menetapkan peraturan, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang mengarahkan perkembangan ekonomi, termasuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam konteks Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi pemerintah desa sebagai regulator terlihat nyata melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret dalam mengorganisir administrasi serta mendukung digitalisasi dalam pengelolaan UMKM.

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Desa Balongdowo dalam Penguatan UMKM Berbasis Digital

NO	Dokumen Kebijakan	Tahun	Substansi Kebijakan	Relevansi terhadap Digitalisasi	Status Implementasi
1	RPJM Des Balongdowo	2021- 2026	Progam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan kapasitas dan literasi digital UMKM	Berjalan
2	RKP Des Tahunan	2024	Pelatihan digital marketing	Literasi digital umkm	Terlaksana
3	Progam pendataan UMKM	2023	Inventarasi usaha desa	Basis data digital UMKM	Manual
4	Kerja sama Poltekes Surabaya	2024	Pembuatan website promosi desa UMKM	Media promosi digital desa	Maintenance

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah desa telah menyusun kebijakan yang mendukung penguatan UMKM, khususnya melalui perencanaan dalam RPJMDes dan RKPDes. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai tata kelola digitalisasi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif kebijakan telah disusun, aspek regulasi teknis masih memerlukan penguatan agar implementasi berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai Regulator Pemerintah Desa Balongdowo telah mengintegrasikan program pengembangan UMKM berbasis digital ke dalam dokumen perencanaan desa, khususnya RPJMDes 2021–2026 pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini memuat arah strategis peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui digitalisasi pemasaran dan penguatan pendataan usaha lokal, kebijakan tersebut masih bersifat normatif karena belum diturunkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang tata kelola UMKM berbasis digital.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum diturunkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes) khusus maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis mengenai tata kelola UMKM berbasis digital. Proses pendataan UMKM masih dilakukan secara administratif melalui pencatatan manual dan rekapitulasi sederhana oleh perangkat desa. Ketiadaan regulasi operasional ini menyebabkan pelaksanaan program belum memiliki dasar hukum teknis yang kuat serta belum menjamin keberlanjutan sistem.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Wawancara dengan Kaur Umum di Desa Balongdowo, disebutkan bahwa pengelolaan website UMKM desa saat ini masih berada dalam tahap percobaan. Ia menjelaskan: *"Pemerintah desa telah melakukan beberapa pelatihan terkait digital, namun website masih dalam proses perawatan. Sebenarnya, website ini adalah hasil sumbangan dari Poltekkes Surabaya."* (Wawancara, 22 September 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan peran regulasi dengan menciptakan sarana digital resmi sebagai bagian dari strategi pengelolaan ekonomi.

Secara analitis, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan praktik regulasi di tingkat desa. Desa telah memiliki legitimasi hukum untuk mengembangkan inovasi digital, tetapi belum membentuk perangkat aturan lokal yang operasional. Dengan demikian, peran regulator masih bersifat normatif dan memerlukan penguatan kelembagaan agar tidak bergantung pada inisiatif individu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan website dan pendataan UMKM belum diatur dalam bentuk peraturan desa (Perdes) atau prosedur operasional standar (SOP) yang tertulis.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator masih bersifat administratif dan belum didukung oleh dasar hukum yang spesifik dalam bentuk regulasi tertulis. Pelaksanaan pengembangan UMKM lebih bersifat programatik dan belum memiliki payung hukum yang mengatur arah serta keberlanjutannya secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kebijakan desa yang lebih terstruktur guna memperkuat fungsi regulatif dalam mendukung ekonomi lokal.

Selain itu, kelemahan tata kelola terlihat dari kurangnya standarisasi prosedur pengelolaan UMKM dan minimnya mekanisme pemantauan berkelanjutan. Pelatihan digital yang diberikan kepada pelaku UMKM belum diikuti dengan pendampingan rutin, sehingga efektivitas transfer pengetahuan menjadi terbatas. Kurangnya dokumentasi formal dan aturan yang jelas membuat pelaksanaan kebijakan bergantung pada inisiatif individu, bukan pada sistem yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan penetapan regulasi tertulis agar peran pemerintah sebagai regulator dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, dari sudut pandang pelaku UMKM, wawancara dengan Bapak Hidayat, seorang pengusaha olahan kupang krispi, menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan pemerintah desa melalui pelatihan digital telah memberikan keuntungan awal dalam memperluas pengetahuan pelaku usaha. mengungkapkan:

"Saya sudah mengikuti pelatihan dari desa, usaha saya adalah kupang, jadi saya ingin memasarkan ke pasar yang lebih luas. Berkat pelatihan di desa serta cerita dari beberapa pelanggan driver online, saya jadi tahu cara menjual di Shopee. Namun setelah pelatihan itu, kami melanjutkan sendiri, karena pendampingannya hanya dari pelatihan yang menjelaskan cara pemasarannya secara online." (Wawancara, 25 September 2025).

Dalam hal ini, pemerintah Desa Balongdowo telah berada di jalur yang tepat dengan membangun infrastruktur digital lokal, tetapi masih memerlukan penguatan pada struktur kelembagaan agar peran regulator dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, bahwa dapat disimpulkan peran Pemerintah desa sebagai regulator dalam pengembangan UMKM belum didukung oleh kebijakan tertulis yang spesifik. Upaya pengembangan ekonomi lokal masih bersifat programatik dan belum diformalkan dalam bentuk regulasi desa. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kebijakan yang terstruktur sebagai penguatan peran regulator.

B. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peranan pemerintah desa sebagai penghubung menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan UMKM yang responsif terhadap kemajuan digital. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung yang memberikan akses terhadap sumber daya, informasi, dan jaringan kolaborasi yang membantu kemandirian ekonomi komunitas.

Pemerintah desa berusaha menciptakan platform promosi online yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada metode penjualan konvensional.

Namun, hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa halaman UMKM di situs tersebut masih dalam proses pemeliharaan dan belum berfungsi secara maksimal sebagai media promosi aktif. *"Pemerintah desa sudah mengadakan beberapa pelatihan digital, tetapi website masih dalam tahap pemeliharaan. Sebenarnya, website ini merupakan bantuan dari Poltekkes Surabaya."* (Wawancara, 22 September 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan fasilitas digital sebagai media promosi untuk UMKM, pengelolaan situs web tersebut belum berjalan secara mandiri.

Selain penyediaan situs web, pemerintah desa juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan digitalisasi usaha bagi pelaku UMKM. Kehadiran pemerintah dalam aktivitas ini menunjukkan bahwa desa berkomitmen untuk menciptakan ruang pembelajaran yang mendukung bagi para pelaku UMKM. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Hidayat, salah satu pelaku UMKM olahan Kupang Krispi, yang menyatakan:

"Saya menghadiri pelatihan di desa, di mana diajarkan cara memasarkan produk melalui Shopee dan WhatsApp. Sesudah itu, kami mencoba sendiri. Namun, bila mengalami kesulitan, biasanya kami bertanya kepada teman yang sudah berpengalaman, karena di desa belum ada pendampingan lanjutan." (Wawancara, 25 September 2025).

Tabel 2. Bentuk Fasilitasi dan Pemerintahan desa Balongdowo Tahun 2023-2025

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

No	Jenis Fasilitasi	tahun	Sasaran	Bentuk Kegiatan	Hasil Awal	Kendala
1	Pelatihan Digital Marketing	2023	UMKM Kuliner	Shopee & WhatsApp Business	8 UMKM mulai mencoba marketplace	Tidak ada pendampingan lanjutan
2	Pelatihan kreatif "Bucket"	2024	Ibu rumah tangga dan UMKM	Pelatihan kerajinan & Branding	Produk dijual saat acara desa	Tidak ada akses pemasaran online
3	Pembuatan Website UMKM	2024	Seluruh UMKM	Fasilitasi promosi digital	Website tersedia	Maintenance belum optimal

Salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan pemerintah desa adalah pelatihan kerajinan "bucket bunga" yang ditujukan kepada ibu rumah tangga dan pelaku UMKM pemula pada tahun 2024. Pelatihan ini berorientasi pada diversifikasi produk ekonomi kreatif dengan memanfaatkan bahan sederhana yang memiliki nilai jual estetis. Berdasarkan hasil wawancara, dengan Ibu Siti peserta pelatihan bucket bunga, sebagai berikut:

"Waktu pelatihan itu kami diajari cara membuat rangkaian bunga dan cara menentukan harga. Saya merasa senang karena sebelumnya belum pernah membuat produk seperti itu. Tapi setelah pelatihan selesai, kami belum tahu cara menjualnya secara online, jadi biasanya hanya dijual kalau ada acara di desa atau pesanan dari tetangga."

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah memberikan pemahaman awal mengenai pemasaran digital, tetapi tidak disertai dengan sistem dukungan setelah pelatihan.

Selain pelatihan, pemerintah desa juga memberikan bantuan sarana produksi berupa bor listrik kepada pelaku UMKM yang mengolah kupang sebagai bahan pangan khas pesisir. Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan mendukung kualitas hasil olahan agar lebih kompetitif di pasar lokal. Namun, pemberian alat produksi ini belum diikuti dengan pendampingan manajemen usaha dan strategi pemasaran digital, sehingga dampak peningkatan nilai tambah ekonomi masih belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balongdowo, sebagai berikut:

“pemerintah desa telah berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program pemberdayaan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelatihan keterampilan, seperti pelatihan pembuatan bucket bunga, serta bantuan peralatan berupa bor listrik kepada pelaku usaha pengolahan kupang. Menurutnya, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk stimulan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.”

Secara konseptual, fungsi fasilitator tidak hanya terbatas pada penyediaan alat, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Tanpa integrasi antara bantuan sarana produksi dan pembinaan usaha, program fasilitasi berpotensi bersifat parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar bantuan alat benar-benar meningkatkan daya saing UMKM kupang di Desa Balongdowo.

Meskipun pemerintah desa telah menyediakan sarana dan pelatihan, terdapat kesenjangan dalam fungsi fasilitator yang berdampak pada efektivitas program. Kurangnya pendampingan lanjutan dan sistem evaluasi membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan mengaplikasikan pengetahuan digital secara berkelanjutan. Hal ini menimbulkan disparitas dalam kemampuan pemanfaatan teknologi antara pelaku usaha yang lebih cepat menyerap pelatihan dengan mereka yang kurang pengalaman, sehingga pengaruh program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat belum merata. Kesenjangan ini menekankan perlunya penguatan mekanisme pendampingan dan monitoring untuk memastikan seluruh pelaku UMKM mendapatkan manfaat yang setara.

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mengadakan pelatihan dan menyediakan sarana digital, tingkat penggunaan teknologi di kalangan pelaku usaha masih sangat rendah. Rendahnya persentase ini disebabkan oleh kurangnya dukungan pelatihan berkelanjutan dan aksesibilitas fasilitas teknologi yang merata di tingkat lokal. Data ini semakin mempertegas temuan bahwa meskipun telah ada upaya fasilitasi, belum terbentuk sistem yang menjamin keberlanjutan dan pemerataan hasil program di seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah desa telah memberikan akses terhadap sumber daya eksternal, seperti perguruan tinggi, dan menyediakan fasilitas pelatihan, namun lembaga di tingkat lokal belum cukup solid untuk mempertahankan hasil yang dicapai. Melalui penguatan kelembagaan ini, fungsi fasilitasi tidak hanya berhenti pada penyediaan sarana, tetapi juga berkembang menjadi mekanisme pembinaan yang berkelanjutan dan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah terbukti memberikan pengaruh awal terhadap peningkatan pengetahuan digital masyarakat, tetapi efektivitasnya tetap tergantung pada komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Balongdowo telah mengambil peran yang signifikan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi digitalisasi untuk UMKM dengan cara menyediakan situs web desa dan memberikan dukungan terhadap program pelatihan. Peran ini juga menjadi fondasi bagi fungsi selanjutnya, yaitu pemerintah sebagai pendorong, yang berfokus pada upaya untuk mempercepat kerjasama dan kolaborasi antar sektor dalam memperkuat pengelolaan UMKM yang berbasis digital.

C. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Berdasarkan hasil temuan di Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai penggerak perubahan terlihat dari inisiatif kerja sama antara pemerintah desa dan mahasiswa Pengabdian Masyarakat dari Poltekkes Surabaya.

Kolaborasi ini menghasilkan dua kegiatan utama yang berdampak positif langsung pada perkembangan digitalisasi UMKM, antara lain pembuatan website untuk promosi UMKM dan penyelenggaraan pelatihan digital bagi pelaku usaha lokal. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kemampuan untuk mendorong jejaring eksternal dalam merealisasikan inovasi layanan dan promosi berbasis teknologi digital.

Kerja sama antara Pemerintah Desa Balongdowo dan Poltekkes Surabaya dimulai pada tahun 2024 melalui program Pengabdian Masyarakat Tematik berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir. Program ini mencakup pembuatan website desa sebagai media promosi UMKM serta pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha olahan kupang. Kolaborasi tersebut bersifat project-based dan dilaksanakan selama masa pengabdian mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2025, halaman UMKM dalam website desa masih berada dalam tahap pemeliharaan dan belum sepenuhnya diperbarui secara berkala. Pengembangan teknis website masih bergantung pada

dokumentasi awal yang dibuat oleh tim mahasiswa Poltekkes Surabaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan inovasi digital belum sepenuhnya terlembagakan dalam struktur organisasi desa.

Triangulasi data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi arsip desa memperkuat temuan bahwa peran katalisator telah berjalan pada tahap inisiasi, tetapi belum pada tahap institusionalisasi. Secara konseptual, peran katalisator menuntut keberlanjutan kolaborasi lintas sektor melalui perjanjian kerja sama formal atau MoU. Oleh karena itu, diperlukan penguatan legalitas kerja sama dan pembentukan tim pengelola digital desa agar dampak katalitik tidak bersifat temporer.

Peran pemerintah sebagai penggerak perubahan juga terlihat dari kerja sama aktif dengan Poltekkes Surabaya dalam pelatihan digitalisasi usaha. Aktivitas ini menjadi bukti bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung yang mempertemukan pelaku UMKM dengan sumber daya pengetahuan dan teknologi yang lebih maju. Hal ini dikuatkan oleh selaku Kaur umum, yang menjelaskan:

“Pemerintah desa telah melaksanakan berbagai pelatihan digital, tetapi saat ini website masih dalam tahap pemeliharaan. Sebenarnya, website ini merupakan kontribusi dari Poltekkes Surabaya.” (Wawancara, 22 September 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun sarana digital yang tersedia masih dalam proses pengembangan, pemerintah desa secara aktif berperan sebagai penggerak melalui kolaborasi antar sektor dan penggunaan potensi eksternal untuk memperkuat ekonomi daerah. Upaya ini menegaskan peran sebagai penggerak yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat terhadap peningkatan kapasitas digital.

Dampak positif dari kegiatan ini dapat dilihat pada munculnya inisiatif mandiri dari pelaku usaha lokal. Salah satu narasumber, Bapak Hidayat, mengungkapkan:

“Saya berbagi pengalaman dari pelatihan di desa, di situ kami belajar cara memasarkan produk lewat Shopee dan WhatsApp. Setelah pelatihan, kami mencoba sendiri. Namun jika menghadapi kesulitan, biasanya kami akan bertanya pada teman yang sudah lebih berpengalaman, karena dari desa tidak ada pendampingan lebih lanjut.” (Wawancara, 25 September 2025).

Kutipan ini mencerminkan adanya dampak katalitik yang signifikan, di mana pelaku UMKM mulai berinisiatif memanfaatkan media digital dalam menjalankan bisnis setelah mendapatkan arahan awal dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa. Dengan kata lain, meskipun aktivitas tersebut belum berjalan secara teratur, pemerintah desa telah berhasil menciptakan kesadaran baru serta perubahan perilaku masyarakat menuju digitalisasi bisnis.



Gambar 2. Kerja sama antara Pemerintah Desa Balongdowo dan Poltekkes Surabaya melalui Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Balongdowo, 2025.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan di lokasi, kerjasama antara Pemerintah Desa Balongdowo dan mahasiswa Pengabdian masyarakat dari Poltekkes Surabaya merupakan salah satu bentuk konkret dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM yang berfokus pada digitalisasi. Namun, dokumentasi lapangan mengindikasikan bahwa saat penelitian berlangsung, laman promosi UMKM di website desa masih dalam status pemeliharaan dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Transformasi peran pemerintah desa sebagai katalisator terlihat dari pergeseran fokus kegiatan yang awalnya bersifat fasilitatif menjadi lebih proaktif dalam mendorong inovasi digital. Selain menyediakan sarana dan pelatihan, pemerintah desa mulai menginisiasi program pemantauan, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Perubahan ini menandai evolusi peran katalisator, di mana pemerintah tidak hanya memicu partisipasi awal, tetapi juga membangun sistem yang mendukung kesinambungan digitalisasi UMKM melalui kolaborasi lintas sektor, integrasi sumber daya eksternal, dan penciptaan jaringan belajar yang berkelanjutan. Dengan demikian,

transformasi ini memperkuat posisi pemerintah desa sebagai penggerak perubahan yang strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi lokal berbasis teknologi digital.

Hal ini menunjukkan bahwa website tersebut masih dalam proses pengembangan dibagian Menu dan belum dapat berfungsi secara optimal sebagai media promosi digital. Secara keseluruhan, hasil dokumentasi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Desa Balongdowo telah mengambil peran dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, menyiapkan sarana kegiatan, serta menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, yaitu mahasiswa Poltekkes Surabaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Balongdowo telah menunjukkan peran katalisator yang signifikan dengan menjalin kerja sama bersama mahasiswa KKN Poltekkes Surabaya dalam pengembangan website promosi dan pelatihan digital untuk pelaku UMKM

VII. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Balongdowo telah menjalankan perannya secara bertahap sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam memperkuat pengelolaan UMKM berbasis digital. Sebagai regulator, pemerintah desa telah menyusun kebijakan ekonomi lokal dan pendataan UMKM sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan, namun belum memiliki kebijakan tertulis atau regulasi khusus yang secara formal mengatur pengembangan UMKM., meskipun belum didukung oleh regulasi formal seperti Peraturan Desa (Perdes). Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya menyediakan fasilitas promosi digital melalui website desa dan pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha, namun implementasinya masih terbatas karena kurangnya pendampingan berkelanjutan dan rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan struktural ini, disarankan pembentukan Unit Pengelola Digital BUMDes yang secara khusus menangani pengelolaan platform digital, pendampingan UMKM, serta evaluasi efektivitas program. Unit ini sebaiknya diperkuat dengan landasan hukum melalui Peraturan Desa (Perdes), yang menjamin keberlanjutan, akuntabilitas, dan alokasi sumber daya yang memadai, sehingga fungsi pemerintah desa sebagai regulator dan fasilitator dapat dijalankan secara optimal dan mendukung transformasi digital UMKM secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada Allah SWT atas kebajikan dan bimbingan-Nya, yang telah memfasilitasi penyelesaian karya ilmiah ini. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, yang bimbingan mendalam, umpan balik konstruktif, dan dukungan tak tergoyahkan telah sangat berharga selama proses penyusunan. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Desa Balongdowo, khususnya Ibu Lubab dalam kapasitasnya sebagai Kaur Jenderal, serta para pemangku kepentingan UMKM, seperti Bapak Hidayat, yang dengan murah hati setuju untuk melayani sebagai informan dan menyampaikan pengalaman signifikan mereka. Penulis juga berhutang budi kepada keluarga, teman, dan kolega dalam Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dorongan moral dan dukungan motivasi mereka. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi positif bagi kemajuan UMKM di desa-desa pesisir.

REFERENSI

- [1] Dian Rokhmawati, "Edukasi Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI) Dukung Produk Lokal UMKM Bagi Karang Taruna Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *JURNAL PADMA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha*, 2024.
- [2] N. Soimah, M. Messi, and D. Q. Imelda, "Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Umkm Pada Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, vol. 10, no. 2, p. 122, 2022, doi: 10.25273/equilibrium.v10i2.12850.
- [3] E. Nurzanah, Y. Marthalena, R. A. Sawitri, and R. Fitriah, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu," *Jurnal Akutansi Aisyah*, vol. 3, no. 1, pp. 13–24, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/23452%0Ahttps://jurnal.unej.ac.id/index.php/JP E/article/download/23452/11022>
- [4] D. W. Priyanugraha and et al., "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Desa UMKM Sebagai Media Pengembangan Potensi Desa," *Judge : Jurnal Hukum*, vol. 5, no. 3, pp. 1–9, Nov. 2024.

- [5] R. Tohir, H. Purnamasari, and I. Aditya, "Peran Pemerintah Desa: Pengembangan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung," *Jurnal Trias Politika*, vol. 7, no. 2, pp. 293–310, 2023.
- [6] F. Fadlurrahman, E. B. Orbawati, R. Pajrin, A. Mukti, and B. Raharjo, "Analisis SWOT dan Framework Implementasi Strategi Pengembangan UMKM," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 8, no. 3, pp. 229–237, 2023, doi: 10.36982/jpg.v8i3.3345.
- [7] N. Nurhayati and U. Abrar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, vol. 10, no. 1, pp. 152–160, 2024, doi: 10.32528/jmbi.v10i1.1659.
- [8] C. K. Sidoarjo, "Industry Kupang Kering Di Desa Balongdowo Kecamatan," vol. 10, no. 3, pp. 30–42, 2017.
- [9] D. Bender, "DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations," *ACM International Conference Proceeding Series*, vol. 18-April-2, no. 1, pp. 45–54, 2016, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [10] B. Setiawan, "EDUKASI E-COMMERCE PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALEMBANG," vol. 2, 2018.
- [11] R. Novianty, S. P. Dewi, and K. Anwar, "Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi," *Jurnal Administrasi Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 50–59, 2024, doi: 10.31294/jab.v4i2.5238.
- [12] U. Di and L. Bajo, "PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL PADA," 2025.
- [13] J. A. Sari and B. A. Diana, "Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, vol. 9, no. 2, pp. 88–96, 2024, doi: 10.36982/jpg.v9i2.3896.
- [14] Thineza Ardea Pramesti *et al.*, "Pendampingan Legalitas Umkm Nib Melalui Sistem Online Single Submission (Oss) Di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar," *PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 385–392, 2022, doi: 10.51574/patikala.v2i1.479.
- [15] G. Santoso, M. Rizal, H. Wiyana, and S. N. Subagja, "Digitalisasi UMKM : Strategi Dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Untuk Keberlanjutan," *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, vol. 01, no. 01, pp. 21–30, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.utmj.ac.id/jubisdigi/about>
- [16] P. Sari Purba, M. Ikhsan Harahap, and Nurbaiti, "Analisis Pengembangan UMKM Go Digital dalam Penyelamatan Ekonomi Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 23, no. 2, pp. 427–433, 2023, [Online]. Available: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- [17] P. Umkm and D. Desa, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik," vol. 1, no. 3, pp. 38–50, 2025.
- [18] L. Z. Firdausya and D. P. Ompusunggu, "Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Abad 21," *Tali Jagad Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 16–20, 2023.
- [19] Dicha Putri Rezkia, "Analisis Penggunaan E-Commerce Bagi UMKM Di Era Digital," 2024. doi: 10.61132/prosemnasimkb.v1i1.13.
- [20] A. M. Fahrezi, S. Munir, and D. Yuliani, "Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Menengah Melalui Platform Digital di Desa Kujang Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 2, no. 3, pp. 260–277, 2025, doi: 10.62383/sosial.v2i3.2147.
- [21] D. A. Rochman and I. U. Choiriyah, "Dampak Tata Kelola Lokal terhadap Pengembangan Desa Pintar di Indonesia," *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, vol. 1, no. 1, p. 17, Jun. 2024, doi: 10.47134/jpem.v1i1.321.
- [22] I. A. Hafitasari, D. A. Adzani, and A. Y. Mafruhah, "Analisis Hubungan E-Commerce terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, vol. 5, no. 2, pp. 95–105, 2022, doi: 10.33005/jdep.v5i2.401.
- [23] E. Nurzanah, Y. Marthalena, R. A. Sawitri, and R. Fitriah, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu," 2021. [Online]. Available: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/23452%0Ahttps://jurnal.unej.ac.id/index.php/JP E/article/download/23452/11022>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.